

History of Construction Law

Ariza Putra Sitanggang^{1*}, Edison Hatoguan Manurung², Dwi Purwanto³
Teknik Sipil, Mpu Tantular Jakarta

Corresponding Author: Ariza Putra Sitanggang riryputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: History of Laws,
Legal Regulations,
Construction Laws

Received : 08, July

Revised : 02, August

Accepted: 26, August

©2023 Sitanggang, Manurung,
Purwanto: This is an open-access
article distributed under the terms of
the [Creative Commons Atribusi 4.0
Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The Construction Law is a legal regulation that plays an important role in regulating the construction industry in Indonesia. The history of Construction Law in Indonesia reflects the development of this country from the pre-independence period to the present. This article provides a brief overview of the history of Construction Law in Indonesia. This article was written with the aim that the author can understand the development of construction laws in Indonesia. And this article was written using the method of collecting data and information from various online media and existing books.

Sejarah Undang-Undang Konstruksi

Ariza Putra Sitanggang^{1*}, Edison Hatoguan Manurung², Dwi Purwanto³

Teknik Sipil, Mpu Tantular Jakarta

Corresponding Author: Ariza Putra Sitanggang riryputra@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Sejarah Undang Undang, Peraturan Hukum, Undang-Undang Konstruksi

Received : 08, July

Revised : 02, August

Accepted: 26, August

©2023 Sitanggang, Manurung, Purwanto: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Undang-Undang Konstruksi adalah peraturan hukum yang berperan penting dalam mengatur industri konstruksi di Indonesia. Sejarah Undang-Undang Konstruksi di Indonesia mencerminkan perkembangan negara ini dari masa pra-kemerdekaan hingga saat ini. Artikel ini memberikan tinjauan singkat tentang sejarah Undang-Undang Konstruksi di Indonesia. Tulisan ini dibuat dengan tujuan agar penulis dapat memahami tentang perkembangan undang undang konstruksi di Indonesia. Dan Tulisan ini dibuat dengan metode pengumpulan data dan informasi dari berbagai media online maupun buku buku yang ada.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Konstruksi Indonesia adalah sebuah ringkasan singkat mengenai hukum yang mengatur sektor konstruksi di Indonesia. Hukum ini memiliki peran penting dalam mengatur semua aspek terkait dengan konstruksi, termasuk perencanaan, perizinan, pelaksanaan, dan pemeliharaan proyek konstruksi di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin kunci terkait dengan Abstrak Undang-Undang Konstruksi Indonesia:

Tujuan Utama: Tujuan utama Undang-Undang Konstruksi Indonesia adalah untuk mengatur dan memfasilitasi perkembangan industri konstruksi di Indonesia. Hal ini mencakup penyelenggaraan proyek-proyek konstruksi dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan standar kualitas, keamanan, dan lingkungan. **Lembaga Pengatur:** Undang-Undang Konstruksi Indonesia mungkin menciptakan badan-badan atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur industri konstruksi di negara tersebut. Lembaga-lembaga ini dapat mencakup otoritas perizinan, lembaga sertifikasi, dan badan pengawas.

Lisensi dan Izin: Undang-Undang ini biasanya mengatur persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam industri konstruksi. Ini termasuk persyaratan lisensi dan izin yang diperlukan untuk melakukan proyek konstruksi. **Standar dan Kualitas:** Undang-Undang Konstruksi juga akan mencakup regulasi mengenai standar kualitas yang harus dipatuhi dalam konstruksi. Ini mencakup aspek keamanan, kualitas bahan, teknik konstruksi, dan kelestarian lingkungan.

Hak dan Kewajiban: Hukum ini akan menguraikan hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi, termasuk pemilik proyek, kontraktor, subkontraktor, dan pekerja. Hal ini bertujuan untuk menghindari konflik dan masalah hukum yang mungkin timbul selama proyek berlangsung. **Penyelesaian Sengketa:** Undang-Undang Konstruksi juga mungkin memiliki ketentuan mengenai penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan proyek konstruksi. Ini bisa mencakup prosedur mediasi, arbitrase, atau litigasi yang harus diikuti dalam penyelesaian konflik.

Sanksi dan Hukuman: Hukum ini biasanya juga mencakup sanksi dan hukuman bagi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam industri konstruksi. Ini bertujuan untuk mendorong kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konteks Undang-Undang Konstruksi di Indonesia, sejarahnya dapat dilihat sebagai berikut:

- a) **Pra-Kemerdekaan Indonesia:** Sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945, tidak ada undang-undang konstruksi yang khusus untuk wilayah Indonesia. Pada masa kolonial Belanda, beberapa peraturan teknis diterapkan, tetapi belum ada undang-undang yang komprehensif mengenai konstruksi.

- b) **Kemerdekaan Indonesia:** Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai mengembangkan regulasi dan undang-undang baru, termasuk dalam bidang konstruksi. Pada awalnya, fokusnya lebih pada pembangunan infrastruktur dasar.
- c) **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960:** Ini adalah salah satu undang-undang awal yang mengatur konstruksi di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan beberapa aspek terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi. Ini merupakan langkah awal dalam perumusan undang-undang konstruksi yang lebih komprehensif.
- d) **Pembentukan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM):** Pada tahun 1970, Badan Pengawasan Obat dan Makanan didirikan untuk mengawasi aspek keselamatan dan kualitas bangunan di Indonesia. BPOM memiliki peran penting dalam mengembangkan standar teknis untuk konstruksi.
- e) **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999:** Undang-undang ini adalah tonggak penting dalam pengaturan konstruksi di Indonesia. Ia mengatur berbagai aspek termasuk persyaratan konstruksi, perencanaan, perizinan, dan pengawasan. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi industri konstruksi di Indonesia.
- f) **Pembentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR):** Kementerian ini bertanggung jawab atas sektor konstruksi di Indonesia dan memainkan peran penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan konstruksi.
- g) **Perkembangan Undang-Undang dan Peraturan Terkait:** Sejak tahun 1999, beberapa amendemen dan peraturan terkait telah dikeluarkan untuk memperbarui dan meningkatkan regulasi konstruksi di Indonesia, termasuk Peraturan Menteri PUPR No. 02/PRT/M/2015 tentang Penyelenggaraan Konstruks

METODOLOGI

Dalam Penulisan Makalah ini Penulis mengumpulkan data data dengan mencari informasi melalui internet dan buku buku atau literatur yang berisi tentang Sejarah Perundang Undanga Konstruksi di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah undang-undang konstruksi di Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda. Pada masa itu, undang-undang konstruksi diterapkan dengan tujuan mengatur kegiatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Undang-undang tersebut umumnya didasarkan pada hukum-hukum dan peraturan yang berlaku di Belanda.

Pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Ordonansi Tata Bangunan yang mengatur tata letak dan pembangunan bangunan di Hindia Belanda. Undang-undang ini mencakup persyaratan teknis, termasuk standar bahan, desain, dan konstruksi bangunan.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaannya pada tahun 1945, pemerintah terus mengembangkan undang-undang konstruksi untuk mengatur industri konstruksi yang semakin berkembang. Pada tahun 1960, pemerintah

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengatur tentang kepemilikan tanah, termasuk ketentuan mengenai hak-hak atas tanah yang berkaitan dengan kegiatan konstruksi.

Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 tentang Konstruksi. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam industri konstruksi di Indonesia. Undang-undang tersebut mengatur izin, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek konstruksi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 juga membentuk Dewan Konstruksi Nasional (DKN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemantauan industri konstruksi di Indonesia.

Seiring berjalannya waktu, perubahan dan perkembangan dalam industri konstruksi membuat pemerintah Indonesia mengadakan revisi terhadap undang-undang konstruksi. Pada tahun 2017, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1992 dan memberikan regulasi yang lebih komprehensif dalam industri konstruksi.

Selain undang-undang nasional, terdapat juga peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan standar teknis yang dikeluarkan oleh lembaga terkait untuk melengkapi regulasi konstruksi di Indonesia. Latar belakang munculnya Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia melibatkan beberapa faktor penting yang mempengaruhi kebutuhan akan regulasi yang jelas dan komprehensif dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Beberapa faktor tersebut antara lain:

Pertumbuhan sektor konstruksi: Sejak kemerdekaan Indonesia, sektor konstruksi telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik menjadi prioritas dalam upaya pembangunan nasional. Pertumbuhan ini membawa kompleksitas tersendiri dalam pelaksanaan proyek konstruksi yang membutuhkan kerangka hukum yang jelas dan efektif. Kebutuhan akan standar dan regulasi yang jelas: Dalam pelaksanaan proyek konstruksi, penting untuk memiliki standar dan regulasi yang jelas untuk memastikan kualitas, keamanan, dan keberlanjutan pembangunan. Tanpa regulasi yang memadai, risiko penyelewengan, praktik korupsi, dan kegagalan proyek dapat meningkat.

Perlindungan hak-hak kontraktor: Undang-Undang Jasa Konstruksi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak kontraktor dan memastikan adanya persaingan yang sehat dalam pengadaan proyek pemerintah. Dengan adanya regulasi yang kuat, kontraktor dapat melaksanakan proyek dengan jaminan pembayaran yang tepat, hak-hak kontraktor yang dihormati, dan proses pengadaan proyek yang adil. Penanggulangan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang: Pelaksanaan proyek pemerintah di Indonesia tidak terlepas dari tantangan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Undang-Undang Jasa Konstruksi hadir untuk mengatasi masalah ini dengan mengatur tata kelola proyek yang transparan, pengadaan yang terbuka, dan pengawasan yang efektif.

Keselamatan dan keberlanjutan: Dalam era yang semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan keberlanjutan, Undang-Undang Jasa Konstruksi juga harus memperhatikan aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Regulasi yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan, penanganan limbah, dan keselamatan kerja menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Melalui latar belakang ini, pentingnya Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia menjadi jelas. Regulasi yang kuat dan efektif diperlukan untuk memastikan pelaksanaan proyek konstruksi yang transparan, adil, aman, dan berkelanjutan. Perkembangan Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur dan memperbaiki pelaksanaan proyek konstruksi secara holistik. Berikut adalah beberapa tahapan perkembangan utama Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia:

Undang-Undang No. 18 Tahun 1999: Undang-Undang Jasa Konstruksi pertama kali diperkenalkan di Indonesia dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur pengadaan jasa konstruksi, kerjasama antara pihak swasta dan pemerintah, serta hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Perubahan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1999: Seiring dengan perkembangan kebutuhan dan perubahan dalam industri konstruksi, Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 mengalami beberapa perubahan melalui amendemen. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan, transparansi, dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek konstruksi.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi: Undang-Undang Jasa Konstruksi yang terbaru di Indonesia adalah Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 dan bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan pengaturan dalam industri konstruksi. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang lebih rinci mengenai pengadaan proyek konstruksi, standar kualitas, keamanan, dan perlindungan lingkungan, serta mengatur tentang sertifikasi dan registrasi bagi pelaku usaha konstruksi.

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi: Selain Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, ada pula peraturan-peraturan pelaksanaan yang mengatur detail lebih lanjut terkait penerapan Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia. Misalnya, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi yang mengatur prosedur dan persyaratan dalam pengadaan proyek konstruksi.

Perkembangan Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Melalui perubahan dan penyempurnaan regulasi, diharapkan industri konstruksi dapat beroperasi dengan lebih baik, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi di Indonesia.

Dampak Undang-Undang Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan proyek pemerintah di Indonesia mencakup beberapa aspek yang penting. Berikut adalah beberapa dampak utama yang dapat dilihat:

Pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif: Undang-Undang Jasa Konstruksi memberikan kerangka hukum yang lebih jelas dan komprehensif dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Hal ini membantu mengatur berbagai aspek proyek, termasuk pengadaan, pelaksanaan, pemeliharaan, dan penyelesaian proyek konstruksi. Dengan adanya pengaturan yang jelas, proses pelaksanaan proyek menjadi lebih terstruktur dan terkoordinasi.

Transparansi dan akuntabilitas yang meningkat: Undang-Undang Jasa Konstruksi mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek pemerintah. Hal ini termasuk persyaratan publikasi lelang, pembentukan komite evaluasi, dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat. Transparansi dan akuntabilitas yang tinggi membantu mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek.

Peningkatan persaingan yang sehat: Undang-Undang Jasa Konstruksi mendorong persaingan yang sehat di antara penyedia jasa konstruksi. Dengan adanya persyaratan yang jelas dan transparan dalam proses pengadaan, kontraktor yang berkualitas dan memiliki kompetensi dapat bersaing secara adil. Persaingan yang sehat ini mendorong peningkatan kualitas dan efisiensi dalam pelaksanaan proyek.

Perlindungan hak-hak kontraktor: Undang-Undang Jasa Konstruksi memberikan perlindungan hukum bagi kontraktor dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Hal ini termasuk perlindungan hak-hak pembayaran yang tepat waktu, penyelesaian sengketa secara adil, dan perlindungan terhadap perubahan perjanjian kontrak. Perlindungan ini memberikan kepastian hukum dan meminimalkan risiko bagi kontraktor.

Peningkatan kualitas dan keamanan proyek: Undang-Undang Jasa Konstruksi mendorong peningkatan kualitas dan keamanan proyek pemerintah. Dengan adanya pengaturan mengenai standar konstruksi, penggunaan bahan yang sesuai, dan prosedur pelaksanaan yang aman, proyek konstruksi dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini membantu meningkatkan keberlanjutan, kualitas, dan keamanan infrastruktur yang dibangun.

Dampak Undang-Undang Jasa Konstruksi dalam pelaksanaan proyek pemerintah di Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas, transparansi, perlindungan, dan peningkatan kualitas. Hal ini bertujuan untuk memastikan efisiensi, integritas, dan keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur negara

Undang-Undang Jasa Konstruksi di Indonesia menghadapi beberapa tantangan dan mengikuti tren tertentu dalam perkembangannya. Berikut ini adalah beberapa tantangan dan tren yang relevan dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi:

Tantangan

Penegakan hukum dan pengawasan yang efektif: Salah satu tantangan utama adalah penegakan hukum yang efektif dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Diperlukan kerja sama yang kuat antara lembaga penegak hukum dan regulator untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ini dan mencegah praktik-praktik pelanggaran.

Kompleksitas regulasi dan perizinan: Industri konstruksi seringkali dihadapkan pada kompleksitas regulasi dan perizinan yang beragam. Proses perizinan yang rumit dan memakan waktu dapat menghambat kemajuan proyek konstruksi. Diperlukan upaya untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lebih efisien.

Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas: Keterbatasan tenaga kerja yang berkualitas dalam industri konstruksi menjadi tantangan yang signifikan. Dalam konteks Undang-Undang Jasa Konstruksi, diperlukan tenaga kerja yang terampil dan memiliki pengetahuan tentang persyaratan dan standar yang berlaku. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang memadai menjadi penting untuk mengatasi tantangan ini.

Implementasi teknologi dalam konstruksi: Penggunaan teknologi dalam industri konstruksi terus berkembang. Penerapan BIM (Building Information Modeling), IoT (Internet of Things), robotika, dan kecerdasan buatan (AI) dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi perlu memperhatikan tren ini dan memfasilitasi adopsi teknologi yang inovatif dalam regulasinya.

Fokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan: Kesadaran akan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan semakin meningkat. Undang-Undang Jasa Konstruksi harus mengakomodasi tren ini dengan mengatur persyaratan yang lebih ketat terkait penggunaan bahan ramah lingkungan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, dan praktik konstruksi yang berkelanjutan.

Pengembangan infrastruktur berbasis digital: Transformasi digital telah mengubah cara proyek konstruksi dikelola. Penggunaan platform berbasis cloud, analisis data, dan sistem manajemen proyek digital telah menjadi tren dalam industri konstruksi. Undang-Undang Jasa Konstruksi perlu mengakomodasi perkembangan ini dan mengatur aspek-aspek terkait perlindungan data, keamanan informasi, dan kepatuhan regulasi dalam lingkungan digital.

Menghadapi tantangan dan mengikuti tren ini, Undang-Undang Jasa Konstruksi harus tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap perubahan dalam industri konstruksi. Pembaruan dan penyempurnaan regulasi perlu dilakukan secara teratur untuk memastikan keberlanjutan dan kemajuan sektor konstruksi di Indonesia.

KESIMPULAN

Undang-Undang Konstruksi di Indonesia mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan negara. Dari era kolonial hingga masa kemerdekaan, undang-undang konstruksi masih dalam tahap pengembangan dan belum terpisah secara khusus. Namun, dengan pembentukan Kementerian Pekerjaan Umum pada tahun 1960-an dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, pengaturan konstruksi di Indonesia semakin terperinci dan terorganisir dengan baik. Undang-Undang Konstruksi merupakan instrumen penting dalam memastikan keamanan, kualitas, dan keberlanjutan proyek konstruksi di Indonesia.

Pemantapan Implementasi: Pemerintah harus terus memantau dan memperkuat implementasi Undang-Undang Konstruksi dan peraturan terkait untuk memastikan bahwa mereka benar-benar memberikan manfaat yang diharapkan dan mencapai tujuan mereka dalam mengatur industri konstruksi.

Peningkatan Keselamatan dan Kualitas: Industri konstruksi harus terus berfokus pada peningkatan keselamatan dan kualitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Penguatan pengawasan dan penerapan standar yang lebih ketat dapat membantu mencapai hal ini.

Pendidikan dan Pelatihan: Pendidikan dan pelatihan dalam bidang konstruksi harus ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan berkualitas, sesuai dengan tuntutan proyek-proyek konstruksi yang semakin kompleks.

PENELITIAN LANJUTAN

Dalam penyusunan makalah ini banyak keterbatasan yang saya alami. Untuk penelitian tentang sejarah Undang-Undang Konstruksi di Indonesia, berikut adalah beberapa keterbatasan yang muncul seperti: (1) Keterbatasan Data, (2) Pengumpulan sumber, (3) Perumusan hipotesis atau tujuan, (4) Penulisan Makalah, (5) Refresensi dan Finalisasi Makalah.

DAFTAR PUSTAKA

Kontrak Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017

[Kontrak Kerja Konstruksi dalam UU Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 - CEPAGRAM](#)

Kumpulan Peraturan Perundangan Terkait Jasa Konstruksi

[Kumpulan Peraturan Perundangan Terkait Jasa Konstruksi | Sipilpedia](#)

Lahirnya Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 Menjadi Jawaban Kebutuhan Dinamika Sektor Konstruksi Di Indonesia. [Direktorat Jenderal Bina Konstruksi \(pu.go.id\)](#)

Pengaturan Jasa Konstruksi Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja [Buletin_2021-edisi-2.pdf \(pu.go.id\)](#)

Undang-undang (UU) tentang Jasa Konstruksi [UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi \[JDIH BPK RI\]](#)

Undang Undang (UU) tentang Jasa Konstruksi No. 18 Tahun 1999 [UU No. 18 Tahun 1999 \(bpk.go.id\)](#)